

LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT ORANG
PRIBADI MENGGUNAKAN E-FILING PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BELAWAN

*Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

GHEFIRA NUR FATIMAH
2005190011

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP.(061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

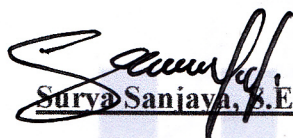
NAMA : Ghefira Nur Fatimah
PROGRAM STUDI : 2005190011
FAKULTAS : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

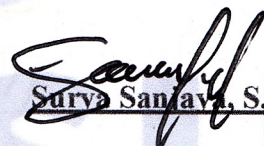
Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 02 Agustus 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing


Surya Sanjaya, S.E., M.M


Surya Sanjaya, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UMSU




Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP.(061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

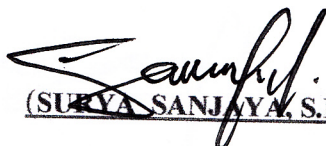
BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

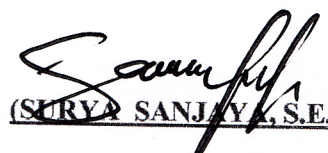
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Jenjang : Diploma III (D-III)
Ketua Program Studi : SURYA SANJAYA, S.E., M.M
Dosen Pembimbing : SURYA SANJAYA, S.E., M.M
Nama Mahasiswa : Ghafira Nur Fatimah
NPM : 2005190011
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06/07/23	perbaikan laporan beladef	8	
	- perbaikan Manifest dan upsur.		
11/07/23	perbaikan laporan		
	- perbaikan kutipan teori pendukung	8	

Pembimbing

Medan, 27 Juli 2023
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi


(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)


(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Pajak
Jenjang : Diploma-III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Nama Mahasiswa : Ghafira Nur Fatimah
NPM : 2005190011
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18/07	- perbaiki bab 0		
	- perbaiki kesimpulan dan saran.		
17/07	Selesai di Dinkes - Ace untuk Jilid 1.		

Medan, 27-Juli 2023

Pembimbing

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Orang Pribadi Menggunakan E-Filling Pada KPP Pratama Medan Belawan”**. Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus Program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan PPL, yaitu KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN. Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan ini pun tidak lepas dari para bantuan bapak/ibu pembimbing serta kepada semua pihak yang berperan mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Penulis menyadari sebagai umat yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tentang laporan ini.

Penyusunan Laporan Program Lapangan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan doa, dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Program Pengalaman Lapangan (PPL)

2. Kedua Orangtua, **Ayahanda Sanjaya** dan **Ibunda Eni Sugianti** yang selalu memberikan doa restu dan dukungannya baik secara moril ataupun material kepada penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri,SE., MM., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Assoc.Prof.Dr. Ade Gunawan,SE., M.Si** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, SE., M.M** Selaku Ketua Prodi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing Program Pengalaman Lapangan yang meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Laporan Program Pengalaman Lapangan.
8. Bapak **Muhammad Irsan, SE., M.Ak** Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Priambudi Pelita Handoko, S.T., M.T** Selaku Kepala Kantor KPP Pratama Medan Belawan.

10. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Ibu **Khadijah, SE., M.M** Selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan.
12. Ibu **Dewi Lisbet Tampubolon** Selaku PIC/Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan.
13. Teman-teman seperjuangan dari semester1 1 (satu) hingga sekarang di D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna, baik dari penulisan,maupun isi laporan ini karena keterbatasan dan kesalahan. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk melengkapi penulisan laporan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Juni 2023

Penulis

Ghefira Nur Fatimah

2005190011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	3
BAB II DESKRIPSI DATA	6
1. Kajian Teori	6
A. Pengertian Pajak.....	6
B. Fungsi Pajak	7
C. Pengelompokkan Pajak	8
D. Hambatan dan Sistem Pemungutan Pajak.....	9
E. Asas-asas Pemungutan Pajak	12
F. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	13
G. Bentuk dan Jenis SPT.....	15
H. Sanksi Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	16
I. e-Filing Pajak	16
J. Manfaat e-Filing.....	19
2. Deskripsi Data.....	20
a. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan	20
b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan.....	23

c. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan	25
d. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan.....	25
e. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan	26
3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	31
a. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL	31
b. Prosedur Kerja.....	32
c. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya	35
BAB III PENUTUP	38
1. Kesimpulan	38
2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gamba 2.1 Bagan Sktruktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur	19
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LEMBAR LAPORAN PENGESAHAN PPL**
- 2. LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN PPL**
- 3. LEMBAR PENILAIAN KERJA**
- 4. LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL**
- 5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
- 6. DAFTAR HADIR SELAMA PPL**
- 7. AGENDA HARIAN SELAMA PPL**
- 8. LAMPIRAN FOTO**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kuliah wajib tempuh untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kerja yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan tenaga kerja demikian perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas, disertai keterampilan serta kedisiplinan yang tinggi, semua dapat dilakukan melalui dunia pendidikan dan pelatihan. Pelatihan itu sendiri yaitu Program Pengalaman Lapangan.

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengan masyarakat khususnya dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan mengatasinya yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kerja.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadikan kegiatan Laporan Pengalaman Lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan harapan mahasiswa

yang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan ini dapat mempraktikkan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan dengan kenyataan di dunia kerja khususnya mahasiswa program studi D-III Manajemen Perpajakan.

Dengan semakin ketatnya persaingan kerja, Program Pengalaman Lapangan ini merupakan langkah awal sebagai alat pengenalan mahasiswa pada dunia kerja nyata. Karena dengan mengikuti Program Pengalaman Lapangan maka mahasiswa tidak merasa kaku atau canggung lagi saat bekerja.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Praktek Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 05 Mei 2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan JL. Kolonel Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Jam kerja yang dilakukan penulis terbagi menjadi dua sesi, pagi 07.30 – 12.00 WIB dan siang 13.15 – 16.00 WIB.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan dibagian seksi Pelayanan. Ruang Lingkup yang dikerjakan pada seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
2. Asistensi Validasi NIK menjadi NPWP.

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Belawan dengan seluruh karyawan. Semua kegiatan

operasional dilakukan bersama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi KPP Pratama Medan Belawan.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman lapangan (PPL)

1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam hal ini Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Belawan, khususnya bagi mahasiswa/i yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan kepada calon Ahli Madya bagaimana situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya.
- b. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam dunia kerja.
- c. Melatih kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap lebih baik, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja.
- d. Menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan terhadap jenis-jenis pekerjaan, kemantapan, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan A.Md di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan

Adapun Manfaat dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, antara lain :

a. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek kerja.
- 2) Menambah pengetahuan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan, yaitu membantu Wajib Pajak dalam pengisian SPT dan pelaporan melalui e-filing.
- 3) Memperkaya pemahaman penulis terhadap dunia kerja karena mampu menjadi sarana orientasi yang tepat terhadap lingkungan dunia kerja yang nyata.
- 4) Mengembangkan karakter profesional yang dibutuhkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang nyata.
- 5) Membangun hubungan yang baik dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

b. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- 1) Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa/i melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
- 2) Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan).

- 3) Program pengalaman kerja sebagai ajang mempromisikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja.
- 4) Untuk menambah relasi kerja.

c. Manfaat bagi KPP Pratama Medan Belawan

- 1) KPP mendapatkan tenaga kerja tambahan untuk melayani Wajib Pajak yang ingin dibantu pelaporan SPT Tahunannya.
- 2) Meningkatkan kualitas dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga pendidik yang menjadi prioritas KPP.
- 3) KPP dapat membantu meningkatkan kualitas SDM.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

A. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Menurut P.J.A Adriani adalah yaitu iuran dari semua rakyat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan terbaru, pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan nasional.

B. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetir)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan caramengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kenijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang memabantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan Pajak (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabiliskan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

C. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

a) Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada Orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada Orang lain.

b) Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berpangkul atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WajibPajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkul pada Objeknya.

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

D. Hambatan dan Sistem Pemungutan Pajak

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sudah seharusnya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang. Selanjutnya, mekanisme pemungutan pajak pusat harus mendapat persetujuan bersama antara rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. Sedangkan pemungutan pajak daerah harus mendapat persetujuan antara rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan untuk kejelasan secara hukum.

Hambatan-hambatan ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlawanan Pajak Secara Pasif

Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah semakin paham tentang pajak

maka pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak. Hambatan pemungutan pajak secara tidak aktif dapat mempersulit.

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu ada tiga cara yaitu:

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

3) Withholding Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

b. Perlawanan Pajak Secara Aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan terhadap pemungut pajak (fiskusi) dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha yang dimaksud yaitu:

1) Menghindari Pajak

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikarenakan pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak

2) Melalaikan Pajak

Pajak hakikatnya, melainkan pajak adalah usaha untuk menolak membayar pajak yang telah ditetapkan. Tindakan ini juga termasuk menolak memenuhi formalitas yang berupa mengagalkan pemungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang disita oleh fiskus.

3) Mengelak dan Menyelundupkan Pajak

Yaitu suatu bentuk perbuatan pura-pura (simulasi) di mana wajib pajak menyembunyikan keadaan sebenarnya, seperti mengajukan pertanyaan yang tidak tepat atau memberikan data yang tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama dilakukan dengan cara mengabaikan formalitas, memasukan dokumen, dan mengisinya secara tidak lengkap. Model pengelakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sebaik-baiknya atau memiliki hubungan khusus dengan fiskus, selain itu, wajib pajak biasanya menggunakan kebebasan sebagai upaya untuk mengelakkan pajak.

E. Asas-asas Pemungutan Pajak

Salah satu tujuan hukum pajak adalah menciptakan keadilan, terutama dalam hal pemungutannya, keadilan didalam pajak harus menjadi pedoman dan syarat mutlak dalam merealisasikan pemungutan pajak secara umum dan merata. Menurut Adam Smith (1773-1790) dalam bukunya "Wealth of Nations". Terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan dengan "The four maxim". Atau yang dikenal sebagai "Asas Pemungutan Pajak secara klasik" sebagai berikut:

a) Asas Equity

Asas Equity adalah pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini artinya suatu negara yang menrapkan pajak tidak boleh menetapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

b) Asas Certainty

Asas Certainty adalah pemungutan yang harus terang dan jelas serta tidak mengenal kompromi. Ini berarti lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU, terutama mengenai subjek dan objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.

c) Asas Convenience OF Payment

Asas Convenience OF Payment adalah pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya dikeluarkan untuk

memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima oleh pihak fiskus.

F. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

1) Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Bagi Wajib Pajak, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam proses pelaporan. SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT PPh berlaku untuk suatu tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun. Untuk SPT Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan, SPT Badan yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau bulan april di setiap tahunnya.

2) Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

a. Bagi Wajib Pajak

Bagi setiap wajib pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan

oleh pihak lain. Kemudian, penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final. Serta pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak atau PKP

Bagi Pengusaha Kena Pajak atau PKP, SPT ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Dimana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPnBM. Terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK). Serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Pemotong dan Pemungutan Pajak

Bagi Pemotong dan Pemungutan Pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pajaknya. Serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya. Yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya.

d. Bagi Petugas Pajak

Bagi petugas pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan.

G. Bentuk dan Jenis SPT

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.534/KMK.04/200 bentuk SPT dibagi Menjadi:

1. SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

2. SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

- a. PPh Pasal 21/26.
- b. PPh Pasal 22.
- c. PPh Pasal 23/26.
- d. PPh Pasal 25.
- e. PPh Pasa 4 ayat (2).
- f. PPh Pasal 15.
- g. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- h. PPN bagi Pemungut.
- i. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

- j. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

H. Sanksi Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tidak/terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi sebagaiberikut:

- a. SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp.500.000,-
- b. SPT asa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan denda sebesarRp.100.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,

Berdasarkan pasal 8 ayat (2a), (3) dan (5) UU no. 28 tahun 2008 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, Pembetulan ketidakbenaran SPT sendiri dikenakan sanksi:`

- a. Sebelum pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2%.
- b. Sebelum menerbitkan SKP dikenakan kenaikan 50%.
- c. Sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150%.

Berdasarkan pasal 38 UU no.28 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dikenakan denda paling sedikit 1 dan paling banyak 2 kali pajak terutang atau kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling banyak 1 tahun penjara.

I. E-Filing Pajak

Electronic Filing atau sering disebut E-filing merupakan sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak

(Surat Pemberitahuan Tahunan / SPT) dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara online dan realtime. Pelapor yang akan melaporkan pajaknya harus memiliki Electronic Filing Identity Number (EFIN) Sebelum melakukan pelaporan pajak SPT.

Penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing dalam Menyampaikan laporan Pajaknya. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Indonesia (DJP) yang berada dibawah naungan KementrianKeuangan Indonesia.SPT yang wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam bentuk dokumen elektronik (e-filing) menurut Direktorat Jendral Pajak sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER -02/PJ/2019 adalahSPT :

- a. SPT Masa
 - b. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
 - d. SPT Masa PPN
 - e. SPT Tahunan.
1. Mengajukan Permohonan Aktivasi E-FIN ke KPP Syarat dan ketentuan permohonan aktivasi E-FIN Wajib Pajak Orang Pribadi.Berdasarkan website resmi perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri dan

Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak luar negeri. Syarat dan ketentuan permohonan E-FIN yaitu :

- a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP terdekat oleh Wajib Pajak (WP) sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- b. Wajib Pajak (WP) mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN.
- c. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi :
 - a) KTP (Bagi WNI). Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA)
 - b) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- d. Daftar Layanan Pajak Online

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri Pada Layanan Online Pajak pada website DJP <https://djponline.pajak.go.id> Berikut langkah mendaftar DJP online :

- a. Masukkan NPWP, Nomor EFIN, dan Kode Keamanan kemudian klik “verifikasi”.
- b. Isi data yang diminta dan buat kata sandi anda.
- c. Setelah mendaftar, anda akan menerima email yang berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.
- d. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda.
- e. Setelah anda terdaftar dan aktif, masuk menu “ profil Lengkap”, Kemudian pada menu hak akses klik semua fitur lalu klik “ubah akses”, Login kembali dan anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan online yang terdapat dalam DJP Online, salah satunya adalah E-Filing.

2. Melaporkan SPT

- 1) Mengasistensi para Wajib Pajak baik Orang Pribadi, pegawaiswasta, honorer, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan TNI-Polri. Siapkan dokumen pendukung yaitu bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk ASN.
- 2) Buka situs <https://djponline.pajak.go.id>.
- 3) Masukkan NPWP dan password yang dibuat saat mendaftar akun DJP Online.
- 4) Klik “login”.
- 5) Pilih “Buat SPT”
- 6) Ikuti Panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT.
- 7) Setelah itu melakukan pengisian e-filing.
- 8) Input data sesuai dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya.
- 9) Setelah selesai periksa kembali data yang telah dimasukkan.
- 10) Kirim kode verifikasi ke gmail.
- 11) Setelah mendapatkan kode verifikasi pilih Kirim SPT.
- 12) Lalu Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan Ke email.

J. Manfaat E-filing

Manfaat bagi wajib pajak kerap kali belum banyak dipahami oleh masyarakat awam. Dengan hadirnya sistem lapor SPT online sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:

- 1) Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan sistem lapor pajak online tentu menghemat lebih banyak waktu.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib pajak sudah tidak harus selalu datang ke KPP, apalagi terkena macet hanya untuk melaporkan pajak mereka.
- 3) Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP sehingga tidak ada lagi antrean panjang.
- 4) Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan. Pemanfaatan sistem online tentu akan mengurangi penggunaan kertas atau dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak dan juga berisiko hilang dan rusak saat melakukan penyimpanan.

2. Deskripsi Data

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai inspektorat Keuangan di jalan Sukamulia NO 17A Medan yang diwilayah kerjanya meliputi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reorganisasi pada inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan Kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan sukamulia NO. 17A Medan, meliputi sebagian wilayah kota Medan, Kabupaten Langkat dan kota Binjai.
- b) Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di jalan Diponegoro NO.30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi kantor Pelayanan pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor inspeksi pajak menjadi 3 bagian yaitu:

- a) Kantor pelayanan Medan Utara,
- b) kantor pelayanan Medan Selatan
- c) Kantor Pelayanan Medan Barat.

Sejak tanggal 3 agustus 1993 melalui keputusan Menteri keuangan Nomor: Kep 758/KM/01/1993 Kantor pelayan pajak pada Jajaran kanwil I Sumbagut dibagi menjadi 4 (Empat) KPP Yang baru, yaitu:

- a) Kantor Pelayan Medan Utara yang beralamat di jalan kejaksanaan No.2 Medan.
- b) Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan.
- c) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di jalan Diponegoro No.30A Medan.
- d) Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di jalan Asrama No.1 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Semula bernama kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan

Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah Namanya menjadi Kantor Pelayan Pajak Medan Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 Dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak,serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA) yang akan melayani pph dan ppN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah pembentukan KPP Pratama serta perubahan alamat kantor terdapat 8 Unit KPP Pratama dilingkungan Kanwil Sumatra 1, diantaranya adalah :

- a) KPP Medan Timur yang beralamat di jalan sukamulia Medan ,wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan perjuangan.
- b) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1 (GKN) Lt. II dan IV Jalan Diponegoro No.30A Medan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai dan Medan Amplas.
- c) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan, dengan Wilayah Kerjanya yaitu meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan baru dan medan tuntungan.

- d) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Barat.
- e) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerjanya meliputi Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan tunggal.
- f) KPP Pratama dan Belawan yang beralamat di JL.K.L. Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah Kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan.
- g) KPP Pratama Binjai yang beralamat JL.jambi No.1 Binjai,dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
- h) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di JL. Diponegoro NO.42- 44 Lubuk Pakam dengan Wilayah Kerja meliputi Kabupaten Deli serdang.

Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membayar pajak. Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan adalah struktur organisasi lini dan staf,yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP.Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut :

1. Visi KPP Pratama Medan Belawan

Adapun Visi KPP Pratama Medan Belawan Sebagai Berikut :

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan moderen yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi KPP Pratama Medan Belawan

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan singkat efeksipitas dan efisensi yang tinggi.

b. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c. Politik

Mendukung proses demokrasi bangsa.

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri.Selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan terdiri dari empat Kecamatan yaitu:

- a) Kecamatan Medan Labuhan
- b) Kecamatan Medan Marelan
- c) Kecamatan Medan Deli
- d) Kecamatan Medan Belawan

d. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan praturan yang berlaku. Dalam melakukan tugasnya, Kantor Pajak pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan.
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- f) Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan.

- g) Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Pelaksanaan Pemeriksaan pajak.
- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
- k) Pembetulan ketetapan pajak

e. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan dan Penjelasan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisinya, tugas dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh pelayanan kantor pajak Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur organisasi Linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordanisasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut, di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan membawa 10 seksi /Sub bagian umum dan

kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana Seksi waskon terdiri orang Account Representative (AR).Dibantu pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagaian Umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana. Adapun Seksi/ Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

- a. Sub bagian Umum
- b. Seksi pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- i. Seksi Pengawasan dan konsultasi 3
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4
- k. Kelompok Fungsional.

Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan



2.1 Gambar

Struktur Organisasi KPP Medan Belawan

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Adapun bidang-bidang kerja di Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasi tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta kelengkapannya. Tugas dan fungsi pelayanan sub bagian umum yaitu:

- a) Penerimaan dokumen di KPP
- b) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di sub bagian umum
- c) Penyampaian pelantikan, sumpah serta terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2) Seksi Ekstensifikasi

Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan dan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan, urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai 3 Koordinator Pelaksana, yaitu:

- a) Koordinator Pelaksana PDI I, bertugas untuk melaksanakan pengolahan data dan menyajikan informasi perpajakan
- b) Koordinator Pelaksana PDI II, bertugas untuk melaksanakan pengolahan data dan menyajikan informasi perpajakan.
- c) Koordinator Pelaksana PDI III, bertugas untuk melaksanakan penggalian potensi perpajakan, ekstensifikasi wajib pajak dan membuat monografi perpajakan.

4) Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan Penetapan dan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak (PPh, PPN, dan Pajak lainnya). Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, rekonsiliasi data wajib dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Penagihan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan perusahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7) Seksi Pemeriksaan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyusutan rencanapemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I, II, III DAN IV)

Seksi ini bertugas mengkoordinasikan pengawasankewajiban perpajakan Wajib Pajakn (PPh, PPN, dan Pajak Lainnya). Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teksis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, Rekonsiliasi Wajib Pajak dalam rangka melakukan intesifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Fungsional terdiri dari pejabat pemeriksaan dan pejabat fungsional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksaan berkoordinasi, integrasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL

Berdasarkan persetujuan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 05 Mei 2023 yaitu mengikuti jadwal yang

telah dibuat oleh koordinator yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan. Jadwal yang sudah ditentukan oleh koordinator ada 2 shift yaitu, shift pagi yang dimulai dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.00 siang dan shift kedua dimulai dari pukul 12.00 siang sampai pukul 04.00 sore. Selama pelaksanaan PPL ini penulis diberikan kesempatan oleh KPP Pratama Medan Belawan untuk melaksanakan pekerjaan pada seksi pelayanan pada bidang SPT Tahunan.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebagai berikut :

- 1) Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Membantu wajib pajak memvalidasi NIK sebagai NPWP

b. Prosedur Kerja Pada KPP Pratama Medan Belawan

Sebelum melaksanakan pekerjaan penulis diberikan pengarahan dari staff/pegawai di seksi pelayanan tentang tata cara yang harus diperhatikan, agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat/ditetapkan di KPP Pratama Medan Belawan. Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan yaitu :

- 1) Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orng Pribadi
 - a. Memanggil Wajib Pajak Melalui Nomor Antrean secara berturut yang masing – masing sudah diambil oleh wajib pajak yang membutuhkan pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan.

- b. memberi salam dengan Wajib Pajak, memperkenalkan diri sembari menanyakan hal yang perlu dibantu oleh penulis dan Mempersilahkan Wajib Pajak untuk duduk.
- c. Jika wajib pajak membutuhkan bantuan asistensi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, maka penulis meminta beberapa data yang diperlukan untuk pelaporan SPT Tahunan seperti bukti potong, NPWP, email yang terdaftar, dan password akun DJP online milik wajib pajak tersebut.
- d. Setelah Wajib Pajak memberikan dokumen dan data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan login account di situs resmi www.djponline.pajak.go.id
- e. Setelah berhasil login, Penulis beralih ke menu profil untuk mengecek apakah akun DJP online milik Wajib Pajak tersebut sudah tervalidasi NIK menjadi NPWP. Jika belum, maka Penulis akan melakukan validasi secara manual yang disesuaikan dengan data pribadi yang tercantum di KTP.
- f. Setelah selesai melakukan validasi, Penulis beralih ke menu lapor untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
- g. Ikuti Panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT.
- h. Penulis melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai data yang tercantum di bukti potong.

- i. Setelah selesai melakukan pelaporan SPT Tahunan, Penulis mengembalikan data-data yang sebelumnya diminta oleh Penulis kepada Wajib Pajak tersebut.
- j. Setelah itu, Penulis meminta Wajib Pajak menilai dan mengisi survey kepuasan setelah mendapatkan layanan asistensi melalui link yang telah disiapkan penulis.
- k. Setelah Wajib Pajak selesai mengisi survey, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wajib Pajak tersebut dan menanyakan apakah ada hal lain yang ingin dibantu.

2) Asistensi Validasi NIK Menjadi NPWP

- a. Memanggil Wajib Pajak Melalui Nomor Antrean secara berturut yang masing – masing sudah diambil oleh wajib pajak yang membutuhkan pelayanan asistensi validasi NIK menjadi NPWP
- b. memberi salam dengan Wajib Pajak, memperkenalkan diri sembari menanyakan hal yang perlu dibantu oleh penulis dan Mempersilahkan Wajib Pajak untuk duduk
- c. Jika Wajib Pajak membutuhkan pelayanan validasi NIK menjadi NPWP, maka penulis akan meminta beberapa data yang diperluka seperti KTP, NPWP, dan password DJP online milik Wajib Pajak tersebut.
- d. Jika terjadi lupa password, maka penulis akan meminta EFIN kepada wajib pajak untuk melakukan reset password.

- e. Setelah Wajib Pajak memberikan data yang diperlukan, maka Penulis akan melakukan *login account* pada situs www.djponline.pajak.go.id
- f. Setelah berhasil *login account*, penulis akan mengarah ke menu profil dan melakukan validasi NIK menjadi NPWP secara manua sesuai dengan data yang tertera di KTP Wajib Pajak tersebut.
- g. Jika terjadi kendala seperti perbedaan nama, kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir, maka penulis akan mengarahkan Wajib Pajak untuk memperbaiki terlebih dahulu ke kantor kecamatan setempat.
- h. Selesai melakukan validasi NIK menjadi NPWP
- i. Penulis meminta Wajib Pajak melakukan penilaian, kritik, dan saran melalui link survey yang sudah disediakan.
- j. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wajib Pajak dan menanyakan apakah ada hal lain yang ingin dibantu.

c. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya

1. Kendala yang dihadapi

Setiap menjalankan aktivitas dalam pelaksanaan kerjanya pasti akan mendapatkan berupa kendala. Begitu pula dengan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan penulis mendapatkan kendala-kendala. Adapun Kendalayang dihadapi penulis yaitu :

- 1) Sebagian Wajib Pajak tidak membawa buki potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1 untuk pegawai dan 1721 A2 untuk ASN)

sehingga penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filing.

- 2) Wajib Pajak tidak membawa NPWP.
- 3) Wajib Pajak yang sudah pernah melaporkan SPT secara elektronik tahun lalu sudah lupa password login DJP Online.
- 4) Wajib Pajak sering kali tidak mempunyai email atau lupa kata sandi email.
- 5) Koneksi internet tidak stabil bahkan buruk, sehingga penulis gagal Submit untuk pelaporan SPT dengan kata lain Eror 732 : Internal Server Error.

2. Upaya Pemecahan Masalah

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyarankan Wajib Pajak untuk datang kembali besok dan membawa atau melengkapisegala keperluan pengisian SPT Tahunan seperti: NPWP dan Bukti Potong 1721.
- 2) Mendampingi serta membantu Wajib Pajak mendapatkan password baru agar Wajib Pajak bisa mengerti cara mendapatkan password baru jika lupa password saat akan loginke DJP online tahun berikutnya. Cara mendapatkan password baru yaitu :
 - a. Masuk ke website DJP Online.
 - b. Bila sudah berada pada halaman Login, maka silahkan klik lupa password.

- c. Masukkan nomor NPWP dan nomor EFIN.
 - d. Verifikasi kode keamanan.
 - e. Klik “submit”.
 - f. Password baru akan dikirim ke email.
- 3) Membuat email untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai e-mail melalui gmail.
- 4) Menggunakan wifi atau menggunakan hotspot dihandphone pribadi dan ketika Error 732 : Internal Service penulis melakukan refresh kembali pada halaman browser.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang penulis laksanakan di KPP Pratama Medan Belawan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya Wajib Pajak yang secara sadar melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Medan Belawan.
2. Dengan adanya program e-filing, Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan dengan jaringan internet yang bisa diakses dimana saja.
3. Pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing di KPP Pratama Medan Belawan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penulis mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana pengisian SPT menggunakan e-filing di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Saran

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman penulis. Maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. KPP Pratama Medan Belawan sebaiknya membuat sosialisasi pihak KPP dengan Wajib Pajak mengenai tatacara menggunakan sistem e-filing supaya pengetahuan Wajib Pajak mengenai sistem pelaporan e-filing lebih baik lagi.
2. KPP Pratama Medan Belawan mengingatkan Wajib Pajak Untuk mengingat kata sandi dan E-FIN saat hendak pelaporan pajak berikutnya.

3. KPP Pratama Medan Belawan meningkatkan jaringan internet saat batas akhir pelaporan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B.(2013).*Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*
- Resmi, S (2017). *Perpajakan teori& Kasus.Salemba Empat. Jakarta*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019 tentang *tatacara penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NANA SOMANA
NPWP : 773120449442000
Tahun Pajak : 2016
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 13/03/2017
Nomor Tanda Terima Elektronik : 80449306337177713151

Gambar 4.2 Bukti Penerimaan Elektronik



Gambar 4.5 Penulis Sedang Melaksanakan Eksistensi di KPP Medan Belawan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKIITAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp.(061)6623301

PERNYATAAN KEASLIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : GHEFIRA NUR FATIMAH
NPM : 2005190011
Program Studi : D-III MANAJEMEN PAJAK
Konsentrasi : -/-
Judul PPL : Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Orang Pribadi
Menggunakan E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Belawan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari Laporan Program Pengalaman Lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SAYA YANGMENYATAKAN



GHEFIRA NUR FATIMAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP.(061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ghefira Nur Fatimah
Tempat dan Tanggal Lahir : P.Brandan, 01 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke- : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sanjaya
Nama Ibu : Eni Sugianti
Alamat : P.Brandan Jl. Sutomo No.19

Pendidikan Formal

1. SD IT ADZKIA BABALAN 2008-2014
2. SMP Mahad Muhammad Saman 2014-2017
3. SMK Kesehata Rachmad Insani 2017-2020
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN
20151

TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-62/WPJ.01/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan ini menerangkan bahwa para Relawan Pajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nama sebagaimana terlampir adalah benar Relawan Pajak yang bertugas sebagai Koordinator dan Agen dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan/asistensi pengisian SPT Tahunan yang dilaksanakan pada,

Periode : Februari s.d. September 2023;

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Juni 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani secara elektronik
Eddi Wahyudi



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

DAFTAR RELAWAN PAJAK MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN	STATUS
1	Aulia Mamora	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
2	Triana Agustini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
3	Firly Salsabillah Erdia Dmt	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
4	Yanggara Tri Armaini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
5	Dewisartika	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
6	Nadya Anggie Syahputri Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
7	Melisa	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
8	Iftitah Sokya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
9	Alma Dhea Arum Sari Sinaga	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
10	Annisah Anggita Sari Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
11	Tia Maryadi Bancin	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
12	Atika Dwi Ananda	KPP Pratama Medan Timur	KORDINATOR
13	Junica Putri Asari	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
14	Cindy Rizkya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
15	Habib Abdurazaq	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
16	Khairul Hamzah	KPP Pratama Medan Belawan	KORDINATOR
17	Rahmalia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
18	Annisa Rezadita	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
19	Ghefira Nur Fatimah	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
20	Sri Rezeki	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
21	Najla Hasibuan	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN



22	Dwi Silvira	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
23	Annisa Alivia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
24	Nayla Ramadhia Nazlida	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
25	I.A Indira Herdasari	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

DAFTARHADIR

NAMA : GHEFIRA NUR FATIMAH
NPM : 2005190011
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

No	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1.	Rabu, 22 Februari 2023	07:30		12:00						
2.	Kamis, 23 Februari 2023					12:00		16:00		
3.	Kamis, 09 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
4.	Senin, 13 Maret 2023	07:30		12:00						
5.	Rabu, 28 Maret 2023	07:30		12:00						
6.	Senin, 10 April 2023	07:30		12:00						

Medan, 2023
Kepala Seksi Pelayanan



(KHADIJAH, S.E., M.M.)


**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

AGENDA HARIAN PPL

NAMA : GHEFIRA NUR FATIMAH
NPM : 2005190011
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
1.	Rabu, 22 Februari 2023	Asistensi Wajib Pajak		
2.	Kamis, 23 Februari 2023	Asistensi Wajib Pajak		
3.	Kamis, 09 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
4.	Senin, 13 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
5.	Rabu, 28 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
6.	Senin, 10 April 2023	Asistensi Wajib Pajak		

Medan, 2023
PIC/ Pelaksana Seksi Pelayanan
KPP Pratama Medan Belawan


(Dewi Lisbet Tamubolon)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

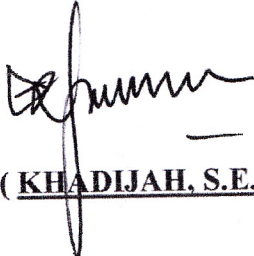
LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : GHEFIRA NUR FATIMAH
 NPM : 2005190011
 PROGRAM STUDI : D-3 MANAJEMEN PAJAK
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

ASPEK YANG DINILAI	NILAI(10-100)	RATA-RATA	KETERANGAN
2. Kompetensi Profesional			
a. Pemahaman tugas	95	Nkpr
b. Kecekatan bekerja	95		
c. Kreativitas bekerja	95		
d. Pemecahan masalah	95		
2. Kompetensi Personal			
a. Kejujuran	96	Nkp
b. Kemandirian	96		
c. Kedewasaan berfikir	96		
g. Tanggung jawab	97		
h. Disiplin	96		
i. Antusiasme kerja	95		
3. Kompetensi Sosial			
a. Komunikasi	95	Nks
b. Kerja sama	96		
c. Empati	96		

Medan, Maret 2023
 Kepala Seksi Pelayanan
 KPP Pratama Medan Belawan

Nilai Praktek(NP)


 (KHADIJAH, S.E., M.M.)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN

N A M A : GHEFIRA NUR FATIMAH
N P M : 2005190011
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika Penulisan	90	
2.	Isi Laporan:		
	a. Pendahuluan	90	
	b. Gambaran Umum Perusahaan		
	c. Pelaksanaan Magang		
	d. Kesimpulan dan Saran		
3.	Kelengkapan Data	90	

Medan, Juni 2023

Dosen Pembimbing


(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)